



## Inspektorat Puji Pemkot Pontianak

PONTIANAK, TRIBUN - Inspektur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) John Itang memuji era kepemimpinan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Pemerintahan Sutarmidji, jelasnya, menerapkan mekanisme pemeriksaan mulai dari awal atau lebih dikenal dengan sistem Planning, Organizing, Actuating and Controlling (POAC).

"Pelaksanaan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan akhir," ujar John

” Kalau kota, saya yakin dan percaya tidak jadi masalah, sama dengan provinsi. Mudah-mudahan kabupaten/kota lainnya sama. ”

### JOHN ITANG

Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

Itang saat membuka Gelar Pengawasan Daerah dan Pe-mutakhiran Data Tindak Lan-jut Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2014 di Hotel Santika Pontianak, Rabu (24/9).

Sejauh ini, pemeriksaan dilakukan pada saat terakhir, sedangkan perencanaan dan pada saat pelaksanaan tidak pernah tersentuh. Padahal,

■ Bersambung ke Hal. 15

## Inspektorat Puji Pemkot Pontianak

Sambungan Hal. 9

item-item tersebut perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam suatu pengawasan.

Ia juga memuji gagasan Sutarmidji yang menyatakan perlunya inspektorat berperan sebagai konsultan pemerintah. "Karena inspektorat yang paling tahu tentang isi pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, lembaga inspektorat perlu adanya dukungan serta komitmen dari setiap kepala daerah. "Kalau kota, saya yakin dan percaya tidak jadi masalah, sama dengan provinsi. Mudah-mudahan kabu-paten/kota lainnya sama. Supaya kepala daerah benar-benar bisa melihat bahwa inspektorat benar-benar dijadikan mata dan telinganya kepala daerah," harapnya.

Dia juga mengajak seluruh inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secermat mungkin. "Hasilnya bukan untuk diekspos, tetapi dituangkan dalam konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kemudian

konsep LHP itu diserahkan kepada kepala daerah," katanya.

Hal itu dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi bargaining atau negosiasi antara pemeriksa dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Terlebih, apabila diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal audit. "Tetapi kalau masih ditangani inspektorat, masih bisa dilakukan perbaikan administrasi karena inspektorat melakukan pemeriksaan di saat pekerjaan tengah berlangsung," jelasnya.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menilai, perlu adanya sosialisasi intern di ruang lingkup pemerintah daerah terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

"Karena banyak juga yang masih belum mengetahui soal TPTGR. Jangankan pada jajaran eselon empat dan tiga, saya yakin sebagian besar eselon dua banyak yang tak tahu tentang bagaimana proses-

nya," katanya.

Dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih sebanyak tiga kali berturut, justru lebih ekstra kerja keras guna meningkatkan kualitas WTP yang telah diraih tersebut.

"Diraihnya WTP bukan berarti pemeriksaan lebih longgar, justru BPK lebih ekstra ketat dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkot," imbuhnya.

Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terkait kualitas pekerjaan fisik, yang pertama diperiksa terlebih dahulu pihak konsultan pengawas pekerjaan fisik tersebut.

"Jangan periksa kepala SKPD atau PPTK-nya dulu, konsultannya dulu yang diperiksa. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan terbukti, ada indikasi kerja sama antara PPTK atau pimpinan proyek maupun kepala SKPD-nya, baru mereka diperiksa," pungkasnya. (qky)